

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(Studi Pada Program Bina Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta
Kabupaten Sidoarjo)**

Jumiase

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
jumiase.18060@mhs.unesa.ac.id

Meirinawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Namun dalam implementasinya, mayoritas CSR di Indonesia hanya dijadikan sebagai ajang untuk membentuk citra positif perusahaan saja dan bukan merupakan kesadaran dari internal perusahaan untuk membangun sebuah perekonomian yang berkelanjutan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo adalah salah satu perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan CSR. CSR yang dilakukan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo ialah CSR pada program bina lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan gambaran mengenai implementasi *corporate social responsibility* pada program bina lingkungan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Delta Tirta Sidoarjo telah melaksanakan program CSR bina lingkungan dalam program pemberian bantuan sosial berupa sembako. Berdasarkan prinsip keberhasilan implementasi CSR menurut Crowther dan Aras, ada 3 (tiga) aspek implementasi program CSR bina lingkungan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo, yakni: a) *Accountability* (pertanggung jawaban), b) *Transparency* (keterbukaan), dan c) *Sustainability* (keberlanjutan). Pada aspek *accountability* sudah memenuhi tiga poin capaian keberhasilan. Pada aspek *transparency* hanya satu poin saja yang terpenuhi. Sedangkan pada aspek *sustainability* ada dua poin yang terpenuhi. Saran untuk penelitian ini adalah dalam meningkatkan aspek *transparency* sebaiknya laporan kegiatan dan pendanaan program CSR dapat diunggah di *website* resmi PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan.

Kata Kunci: Implementasi program, *corporate social responsibility*, Program Bina Lingkungan, PDAM.

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) is a form of company concern for social conditions and the surrounding environment. However, in its implementation, the majority of CSR in Indonesia is only used as a platform to form a positive image of the company and is not an internal awareness of the company to build a sustainable economy. Regional Drinking Water Company (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo is one of the companies that has an obligation to implement CSR. The CSR carried out by PDAM Delta Tirta Sidoarjo is CSR in the environmental development program. This study aims to provide a description and description of the implementation of corporate social responsibility in the environmental development program at PDAM Delta Tirta Sidoarjo. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique was carried out using the literature study method. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that PDAM Delta Tirta Sidoarjo has carried out the CSR program for environmental development in a program of providing social assistance in the form of groceries. Based on the principle of successful CSR implementation according to Crowther and Aras, there are 3 (three) aspects of implementing the CSR program for environmental development in PDAM Delta Tirta Sidoarjo, namely: a) *Accountability*, b) *Transparency* (openness), and c) *Sustainability*. In the aspect of *accountability*, three points of success have been met. In the aspect of *transparency*, only one point is met. While in the aspect of *sustainability* there are two points that are fulfilled. The suggestion for this research is to increase the *transparency* aspect, it is better if the CSR program activities and financing reports can be uploaded on the official website of PDAM Delta Tirta Sidoarjo as part of the company's annual report.

Keywords: Program implementation, *corporate social responsibility*, environmental development program, PDAM.

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua bidang atau sektor merupakan idaman bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam sektor bisnis berbagai upaya dilakukan oleh setiap perusahaan agar menjadi lebih unggul dari perusahaan lain dalam persaingan global. Untuk itu beberapa prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG) penting untuk diimplementasikan. Prinsip-prinsip tersebut yakni meliputi *accountability*, *transparency*, *responsibility*, *fairness* dan *independency*. Dari salah satu prinsip GCG tersebut yakni mengenai masalah pertanggungjawaban (*responsibility*) nyatanya dapat dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya ialah dengan menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR). (Aulya et al., 2014)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang biasa disebut Tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Hal tersebut meliputi beberapa aspek yakni aspek ekonomi, hukum, etika serta kontribusi pada isu-isu sosial (Carroll dalam (Mardiansyah dan Safaruddin, 2022)). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan untuk turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan bahwa CSR sebagai suatu komitmen berkelanjutan yang dilakukan oleh korporasi untuk ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, memperbaiki taraf kehidupan karyawannya sekaligus keluarga dari karyawan tersebut, masyarakat sekitar (lokal) dan masyarakat luas (Mardiansyah & Safaruddin, 2022). Disisi lain, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* termasuk dengan pegawai, pemilik atau investor, masyarakat dan pemerintah. Sehingga dalam penerapannya perlu melibatkan para *stakeholder* didalamnya agar kelompok sasaran, indikator keberhasilan dan tindak lanjut kegiatannya dapat memperoleh hasil yang lebih optimal.

Di masa sekarang, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor apapun dituntut untuk tidak hanya mengelola reputasi perusahaan secara finansial saja melainkan juga harus mengelola reputasi perusahaan secara sosial. Reputasi keuangan dikelola melalui kinerja keuangan perusahaan, seperti stabilitas keuangan dan kelangsungan hidup. Sedangkan reputasi sosial dikelola melalui efektivitas perusahaan dalam melaksanakan CSR (Pambayun dan Oktariyanda, 2021). Namun dalam implementasinya, mayoritas CSR di Indonesia masih berupa kariatif dan hanya dijadikan sebagai ajang untuk membentuk citra positif perusahaan saja. Implementasi CSR ini nyatanya belum sepenuhnya merupakan keinginan dan kesadaran dari internal perusahaan untuk membangun sebuah perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berada disekitar daerah operasionalnya (Pranoto dan Yusuf, 2014).

John Elkington (Suharto, 2006) mengungkapkan bahwa ada tiga poin yang menjadi prinsip dasar dalam mengimplementasikan CSR yakni keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Ketiga prinsip tersebut dinamai sebagai konsep *triple bottom line*. Yang mana apabila perusahaan ingin agar tetap dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka disamping memerhatikan keuntungan (*profit*), harus pula diimbangi dengan kegiatan yang bersifat peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta mau turun tangan dalam hal mempertahankan kelestarian alam (*planet*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Zalliza Guz. Beliau berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya perlu diimbangi dengan perhatian yang lebih melalui ide terhadap bagaimana cara menanggulangi dampak dari aktivitas operasional perusahaan tersebut untuk generasi mendatang dan lingkungan di masa depan (Gaus dan Meirinawati, 2021). Pada perkembangannya, saat ini CSR iku diselaraskan dgn tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs dilakukan dengan cara membuat dan menyusun Rencana aksi atau agenda TPD/SDGs yang menysasar pada prinsip 5p, yaitu *People*, *PlanetProsperity*, *Peace* dan *Partnership* (M. dan Thaher, 2018).

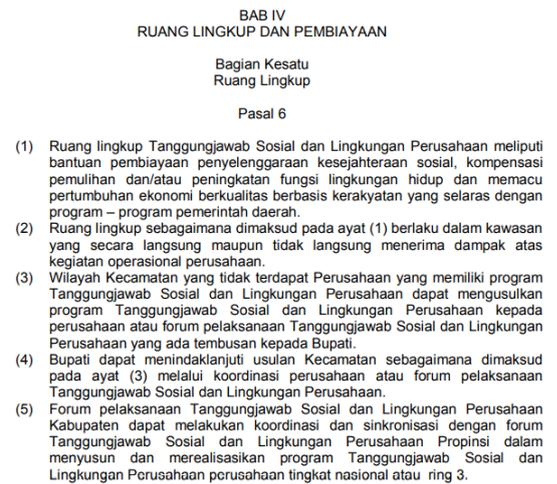
Implementasi CSR merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses bisnis Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Terlebih di saat pandemi, BUMN dituntut untuk semakin aktif dalam menanggulangi dampak sosial dan masyarakat (Wijonarko dan Astuti, 2022). Dalam implementasinya sendiri, program CSR dibagi menjadi dua yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Program Kemitraan merupakan program yang ditujukan untuk memberikan peningkatan kemampuan pada usaha kecil agar menjadi lebih tangguh dan mandiri dengan memanfaatkan dana dari laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat dan membentuk calon mitra binaan yang baru oleh BUMN dengan memanfaatkan dana dari bagian laba BUMN (Alifah, 2020).

Sementara itu, penggunaan laba Badan Usaha Milik Daerah untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tercantum dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mana BUMD melaksanakan TJSL melalui penyisihan sebagian laba bersih yang diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Besaran presentase dari bagian laba bersih untuk dana TJSL/CSR, baik BUMN maupun BUMD, tidak atau belum dicantumkan dalam regulasi. Untuk itu beberapa daerah telah mengatur sendiri besaran minimal anggaran CSR di daerahnya. Sebagai contoh, terdapat daerah yang mencantumkan besaran minimal anggaran untuk dana CSR pada masing-masing perusahaan dalam peraturan atau regulasi daerahnya yakni daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dijelaskan bahwa di daerah tersebut pembiayaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya (Yuniarti & Prakoso, 2018).

Menurut Aqiela, dkk (2018) implementasi CSR dapat mengambil banyak bentuk. Dalam bentuk legalnya, CSR bisa menjadi *corporate responsibility* (CR), contohnya penerapan undang-undang pajak lingkungan. Melainkan juga dapat dalam bentuk yang lain, yakni komitmen sejati perusahaan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat disekitarnya sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Hamid (2014) mengungkapkan pada penelitiannya bahwa salah satu permasalahan yang muncul dalam implementasi program CSR bina lingkungan ialah terletak pada segi anggaran. Hal ini sejalan dengan belum dicantumkannya besaran persentase yang perlu dianggarkan oleh masing-masing perusahaan dalam melaksanakan program CSR pada peraturan pemerintah.

Berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa pada pasal 6 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR. Ruang lingkup tersebut berlaku pada daerah atau kawasan yang menerima dampak dari aktivitas operasional perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

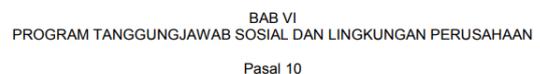


Gambar 1. Ruang Lingkup CSR

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013

Dalam Peraturan Bupati tersebut juga dijelaskan pada pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 bahwa program TJSLP/CSR terdiri dari tiga bentuk program, yakni:

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
2. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. Program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keterampilan dan infrastruktur.



- (1) Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
 - a. Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat di bidang :
 - Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Keagamaan;
 - Ketrampilan; dan
 - Infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Gambar 2. Macam-macam bentuk program CSR

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 ini juga dijelaskan mengenai pengertian serta tujuan dari adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Kemitraan usahamikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 11

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Gambar 3. Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu , produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Gambar 4. Pengertian Program Kemitraan

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013

Sedangkan program langsung pada masyarakat merupakan program yang dapat dilakukan melalui hibah, penghargaan (berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat), subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial dan perlindungan sosial.

Dilansir dari laman *website* m.prorakyat.co (Prorakyat) bahwa implementasi CSR di Sidoarjo belum dikelola secara optimal. Sehingga Sueb (Sekjen Ormas KORAK) berharap masyarakat secara umum perlu mengetahui data realisasinya. Ormas KORAK sendiri merupakan Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi di Sidoarjo yang bertujuan dan bertugas untuk menjalankan kegiatan pencegahan sertamembantu penegak hukum untuk memberantas korupsi di Wilayah Sidoarjo. Beliau menyoroti perihal dari tak pernah ada *update* dalam inventarisasi kegiatan CSR yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terdapat pada *website* csr.sidoarjokab.go.id. Hal ini juga terjadi pada laman *website* pdam.sidoarjokab.go.id yang mana belum adanya publikasi yang memuat pelaksanaan kegiatan atau program CSR secara berkala.



Gambar 5. Agenda Kegiatan Forum CSR Sidoarjo
Sumber: csr.sidoarjokab.go.id



Gambar 6. Info dan Agenda Kegiatan PDAM Delta Tirta Sidoarjo
Sumber: pdam.sidoarjokab.go.id

Crowther dan Aras (2008) menggaris bawahi beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengidentifikasi aktivitas CSR (Rahayu, 2009). Prinsip tersebut terdiri dari tiga aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Accountability* (pertanggung jawaban) merupakan prinsip yang menggaris bawahi pada dasarnya setiap organisasi atau korporasi ialah bagian dari komunitas yang lebih besar sehingga tanggung jawab dari suatu organisasi atau korporasi tersebut tidak hanya terbatas pada pemiliknya secara pribadi, tetapi juga kepada keseluruhan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal;
- 2) *Transparency* (keterbukaan) merupakan prinsip yang memiliki arti bahwa segala tindakan organisasi atau korporasi yang memiliki dampak dan memberikan pengaruh pada lingkungan eksternal wajib dikomunikasikan secara terperinci latar belakang tindakan organisasi atau korporasi tersebut dan tujuannya pada masyarakat;
- 3) *Sustainability* (keberlanjutan) merupakan prinsip yang memberikan penekanan pada efek atau dampak kedepannya yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan atau korporasi di masa sekarang. Pengukuran *sustainability* mencakup kuantitas atau jumlah dari sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan dan hubungannya dengan kuantitas atau jumlah yang mampu dikembalikan atau dipulihkan untuk kehidupan di masa yang akan datang,

sustainability juga didefinisikan sebagai *capable of being sustained* atau kemampuan untuk menjadi gigih atau mampu bertahan secara kontinu (berkelanjutan).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti terkait, “**Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Pada Program Bina Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo)**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi *corporate social responsibility* pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana implementasi *corporate social responsibility* pada program bina lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dianalisis menggunakan prinsip implementasi CSR Menurut (Crowther dan Aras, 2008). Terdapat 3 prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan CSR, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Accountability* (pertanggung jawaban)
- 2) *Transparency* (keterbukaan)
- 3) *Sustainability* (keberlanjutan)

Pada implementasinya setiap prinsip/aspek yang telah disebutkan sebelumnya memiliki indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang dijalankan tersebut. Berikut merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi program CSR berdasarkan fokus diatas (Ghoni et al., 2020):

- 1) *Accountability*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program CSR pada aspek *accountability*, maka dapat dijabarkan melalui poin-poin berikut ini:
 - a) Dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
 - b) Relevansi kepada pengguna terhadap informasi yang disediakan;
 - c) Keandalan dalam hal akurasi pengukuran, representasi dampak dan kebebasan dari bias; dan
 - d) Komparabilitas, yang menyiratkan konsistensi.
- 2) *Transparency*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program CSR pada aspek *transparency*, maka dapat dijabarkan melalui poin-poin berikut ini:
 - a) Penyusunan dan penyebaran laporan tahunan;

- b) Pengembangan mekanisme *checks and balance*;
- c) Penyebaran informasi ke masyarakat; dan
- d) Penyebaran informasi dalam bentuk yang tepat.

- 3) *Sustainability*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program CSR pada aspek *sustainability*, maka dapat dijabarkan melalui poin-poin berikut ini:
 - a) Pengaruh masyarakat;
 - b) Dampak terhadap lingkungan sekitar;
 - c) Budaya organisasi; dan
 - d) Keuangan

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka, yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang berhubungan dengan topik penelitian yang berasal dari artikel, jurnal makalah dan laman *website online* dari sumber yang terpercaya. Terdapat empat tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2011:246). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel serta berita yang terkait dengan implementasi CSR yang dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta di wilayah Sidoarjo. Reduksi data, data yang telah dihimpun akan diseleksi dan diringkas sedemikian rupa. Penyajian data, data yang telah diseleksi dan diringkas selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penarikan kesimpulan, setelah disajikan lalu dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ialah salah satu perusahaan umum milik daerah yang bergerak dibidang penyediaan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat secara luas. Di setiap provinsi, kabupaten atau kotamadya di seluruh Indonesia selalu terdapat setidaknya satu PDAM, tak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo. PDAM yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo yakni PDAM Delta Tirta. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PDAM Delta Tirta memiliki visi yaitu tersedianya air minum yang semakin baik dan sehat yang dikelola secara amanah dan profesional. Sementara itu, PDAM Delta Tirta juga memiliki misi yakni sebagai berikut: meningkatkan kinerja aspek pelayanan, aspek keuangan, dan aspek operasional; meningkatkan kinerja sumber daya manusia, kinerja aspek administrasi, dan kesejahteraan karyawan; Meningkatkan sinergitas dengan semua pihak terkait

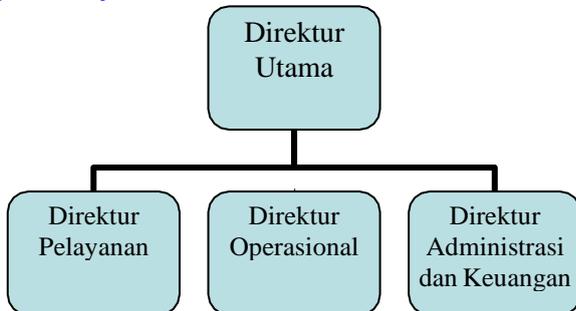
dalam pengelolaan perusahaan yang berakhlakul karimah. (<http://pdam.sidoarjokab.go.id>).



Gambar 7. Visi dan Misi PDAM Delta Tirta Sidoarjo

Sumber: pdam.sidoarjokab.go.id

Sementara itu, dalam pengelolaan organisasinya perusahaan ini masing-masing memiliki 1 (satu) orang Direktur Utama, Direktur Pelayanan, Direktur Operasional serta Pjs Direktur Administrasi dan Keuangan. (<https://radarsidoarjo.jawapos.com> dan <https://beritajatim.com>)



Gambar 8. Bagan atau Struktur Organisasi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo

Sumber: dikelola oleh peneliti.

Program CSR yang dilakukan oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan nama CSR merupakan salah satu dari bentuk kepedulian suatu perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat disekitarnya. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, 2015 (dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015), bentuk kepedulian perusahaan ini dapat dibagi menjadi dua yakni program kemitraan dan

program bina lingkungan. Program Kemitraan merupakan program yang ditujukan untuk memberikan peningkatan kemampuan pada usaha kecil agar menjadi lebih mandiri dan juga semakin tangguh. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program yang ditujukan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Baik Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan, keduanya dilakukan dengan memanfaatkan dana dari laba BUMN (infopkbl.bumn.go.id)

Dalam implementasinya, ada beberapa bentuk bantuan atau program yang terdapat dalam program bina lingkungan oleh BUMN, yakni sebagai berikut:

1. Bantuan pada korban yang terdampak bencana alam
2. Bantuan pada peningkatan kesehatan
3. Bantuan dalam pembangunan sarana ibadah
4. Bantuan sosial kemasyarakatan
5. Bantuan pendidikan atau pelatihan
6. Bantuan pengembangan sarana umum
7. Bantuan dalam pelestarian alam; dan
8. Bantuan pada mitra binaan



Gambar 9. Bentuk Bantuan dalam Program Bina Lingkungan BUMN

Sumber: infopkbl.bumn.go.id

Dilansir dari laman [website m.prorakyat.co](http://m.prorakyat.co) (Prorakyat) bahwa implementasi CSR di Sidoarjo ternyata belum dikelola secara optimal. Sehingga masyarakat secara umum perlu mengetahui data realisasinya. Pada laman tersebut juga dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang telah mengimplementasikan program CSR memiliki kewajiban untuk menyusun laporan yang mana isinya memuat tentang waktu pelaksanaan program, bentuk program CSR yang dilaksanakan, besaran biaya, *output*, *outcome*, serta dampak positif dan negatif bagi perusahaan maupun masyarakat. Menurut Sueb (Sekjen Ormas KORAK), menyoroti dari tak pernah ada update dalam inventarisasi program CSR yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terdapat pada [website csr.sidoarjokab.go.id](http://website.csr.sidoarjokab.go.id), maka beliau mendesak agar Bappeda Sidoarjo selaku instansi penanggungjawab dalam mengelola program CSR untuk mempublikasikan realisasi

data kegiatan CSR selama 2 tahun belakangan ini. Sehingga kedepannya dapat diketahui apa saja bentuk pembangunan yang diberi dana dari CSR ini dan apakah pembangunan tersebut berwujud pembangunan infrastruktur ataukah berwujud pembangunan sumber daya manusia.



Gambar 10. Info dan Agenda Forum CSR Sidoarjo

Sumber: csr.sidoarjo.kab.go.id

Berdasar pada data yang diperoleh peneliti, PDAM Delta Tirta Sidoarjo mengimplementasikan CSR dalam Program Bina Lingkungan, khususnya pada bantuan sosial kemasyarakatan. Program CSR bina lingkungan yang dilakukan yakni program bantuan langsung melalui pemberian bantuan sosial berupa sembako. Sembako tersebut disalurkan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo kepada masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah Sidoarjo. Pemberian bantuan sembako ini dilakukan sebagai upaya dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung pada masyarakat sekitar. Program tersebut dilakukan ketika negara Indonesia berada pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Bantuan yang disalurkan ini secara langsung dapat memberikan manfaat yang begitu berarti bagi masyarakat yang mana sebagian dari mereka merupakan warga Sidoarjo yang di-PHK dari tempat mereka bekerja. Sementara bentuk bantuan lain yang dilaksanakan oleh perusahaan ini yaitu bantuan pelestarian alam berupa program Sido Resik (Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air bersih. Kemudian dalam bantuan peningkatan kesehatan dan bantuan pelatihan atau pendidikan masih dalam pengajuan dana kepada pemerintah. Sedangkan bentuk bantuan yang lain belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ditinjau dari prinsip dasar CSR yakni *triple bottom line* yang terdiri dari 3 poin antara lain, keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*), PDAM Delta Tirta dinilai telah melaksanakan prinsip tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan, PDAM Delta Tirta juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayahsekitarnya.

Sementara itu, ditinjau dari tiga (3) prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan dalam mengimplementasikan program CSR menurut (Crowther dan Aras, 2008), Program CSR Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo dapat dijabarkan yakni sebagai berikut:

1. *Accountability*

Dalam implementasinya, ada 4 (empat) syarat yang wajib terpenuhi pada prinsip akuntabilitas yakni sebagai berikut:

Pada poin pertama, yakni dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam mengimplementasikan program CSR agar seluruh informasi dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan, maka dibutuhkan komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi menjadi hal yang diperlukan oleh setiap implementor atau pelaksana program untuk mengetahui apa saja yang wajib dikerjakan. Bagi sebuah organisasi, komunikasi dijadikan sebagai sebuah proses untuk menyampaikan informasi maupun gagasan diantara anggota yang satu dengan anggota lainnya pada organisasi secara dua arah dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Maka dari itu, keberhasilan implementasi tak lepas dari komunikasi yang dibangun oleh implementornya. Komunikasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai implementasi CSR agar seluruh informasi tersebut dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, pihak yang berkepentingan dalam program CSR bina lingkungan ini adalah masyarakat Sidoarjo penerima bantuan sosial. Masyarakat sebagai pihak penerima bantuan pada program ini telah mengerti setiap informasi yang disampaikan oleh pihak pemberi yaitu PDAM Delta Tirta. Pihak pemberi juga telah mengerti bahwa program ini dilaksanakan sebagai pengganti masyarakat yang menginginkan biaya MBR digratiskan, sementara PDAM sendiri keberatan dengan permintaan itu dan lebih memilih untuk memberikan bantuan sosial dalam program CSR bina lingkungan kepada

masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan (*Pandemik Corona, Amir Aslichin Minta PDAM Delta Tirta Sidoarjo Gratiskan MBR*) Penyampaian informasi ini mulai dijalankan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo yang juga turut menggandeng Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM) untuk mensosialisasikan program CSR tersebut (Kotaku).

Selanjutnya poin kedua yaitu relevansi kepada pengguna terhadap informasi yang disediakan. Pada poin ini, pihak PDAM Delta Tirta, terutama tim CSR nya sebagai pihak yang paling relevan dalam program ini senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi penerima bantuan sosial melalui tim CSR dari PDAM Delta Tirta. Penyampaian informasi CSR secara umum kepada masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah forum CSR Sidoarjo yang beranggotakan puluhan perusahaan dan beberapa BUMD yang ada di Sidoarjo. Melalui forum ini diharapkan CSR yang akan diadakan dapat lebih terarah dan terstruktur serta dapat dilaksanakan dengan cara bekerjasama antar perusahaan. Analisis tersebut memberikan penjelasan bahwa pemberian bantuan sosial dalam program CSR bina lingkungan ini informasi disalurkan melalui kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat sekitar sebab sasaran dalam program ini yakni masyarakat Sidoarjo yang berada di wilayah sekitar PDAM Delta Tirta dan terdampak Covid-19, termasuk masyarakat yang di-PHK dari pekerjaannya.

Kemudian poin ketiga yaitu keandalan dalam hal akurasi pengukuran, representasi dampak dan kebebasan dari bias yakni cara implementor program CSR sebelum mengimplementasikan program tersebut apakah sudah menerapkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan apakah program tersebut dapat memberikan pengaruh dan mampu meminimalisir ketidak tercapaian dalam mengimplementasikan program tersebut. Pada poin ini, hasil yang diperoleh peneliti masih sebatas program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Sidoarjo telah memberi manfaat yang

cukup berarti. Bantuan sosial yang diberikan oleh PDAM Delta Tirta setidaknya dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban mereka setelah di-PHK dari pekerjaannya. Implementasi program CSR bina lingkungan yang dilakukan oleh PDAM Delta Tirta yaitu dalam bentuk pemberian bantuan langsung berupa sembako kepada masyarakat disekitarnya dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2020 yang mana pada saat itu terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Akibat pandemi tersebut, banyak masyarakat di Sidoarjo yang terdampak, terutama dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, CSR yang dilakukan oleh PDAM Delta Tirta diberikan kepada mereka yang kurang mampu juga terkena dampak PHK karena melonjaknya kasus Covid-19 tersebut. Sayangnya dalam pengimplementasian program CSR bina lingkungan ini, bahkan hingga penelitian ini ditulis, PDAM Delta Tirta belum tergabung dalam forum CSR Sidoarjo. Sehingga pelaksanaan CSR yang dilakukan sebatas secara individu. Tak hanya itu, belum bergabungnya perusahaan ini dalam forum CSR jugamenandakan bahwa komunikasi yang terjalin antara PDAM Delta Tirta dengan perusahaan maupun BUMD lain di Sidoarjo masih kurang optimal.

Pada poin terakhir yaitu komparabilitas, yang menyiratkan konsistensi. Poin ini memberikan penjelasan bahwa setiap program yang dilaksanakan perlu dibandingkan dengan pelaksanaan program yang sama ditahun-tahun sebelumnya dan bagaimana cara untuk melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan yang terjadi di lapangan, sehingga kedepannya program tersebut dapat terlaksana secara konsisten. Pada program CSR bina lingkungan dalam bentuk pemberian bantuan sosial ini peneliti belum dapat memberikan hasil dari ketercapaian dalam poin komparabilitas ini. Sebab, program CSR yang telah dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta hanya terlaksana 1 (satu) kali ditahun 2020. Sehingga peneliti tidak atau belum dapat membandingkan program ini dengan program yang telah terlaksanaditahun sebelumnya.

2. *Transparency*

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan akuntabilitas maka dalam prosesnya juga harus transparan (Wijonarko dan Astuti, 2022). Transparansi ialah bentuk pelayanan yang memiliki sifat terbuka, mudah serta dapat diakses oleh semua pihak yang

mebutuhkan dan juga disediakan secara memadai dan dapat dengan mudah dimengerti (Siham, 2019). Implementasi program CSR yang menganut prinsip transparansi akan berakibat positif atau baik terhadap segala sektor yang ada, untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam implementasi CSR pada poin transparansi peneliti menggunakan teori dari Limberg, dkk (2009).

Hasil dari implementasi CSR biasanya dicantumkan dalam laporan yang dilaporkan secara terpisah atau dapat digabungkan dalam laporan tahunan. Pada umumnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat hanya mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengendalian terhadap pencemaran (Purnamawati et al., 2018). Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, PDAM Delta Tirta Sidoarjo belum melaksanakan poin transparansi yang mana merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan implementasi CSR (Limberg et al., 2009).

Dalam website resmi milik PDAM Delta Tirta dapat diketahui bahwa belum terdapat informasi yang memuat tentang laporan tahunan, baik yang membahas keseluruhan program maupun salahsatu program yang lebih spesifik (program CSR). Begitu pula perihal penyebaran informasi kepada masyarakat secara umum yang mana sejauh informasi yang peneliti dapatkan yakni belum ada ataupun belum tersedia. Sehingga masyarakat pun tidak mengetahui atau belum mengetahui bagaimana program CSR yang dilakukan maupun perkembangannya (kecuali masyarakat yang diberi bantuan sosial dalam program CSR). Untuk itu penyebaran informasi dalam bentuk yang tepat nyatanya juga belum dilaksanakan oleh pihak PDAM Delta Tirta, terlebih untuk masyarakat Sidoarjo secara umum. Sebab, informasi mengenai program CSR hanya diberikan kepada masyarakat yang diberi bantuan sosial saja.

Padahal jika dikaji lebih lanjut, pembuatan dan penyebaran informasi mengenai program CSR bina lingkungan ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan semestinya mengingat dalam pengelolaannya, PDAM Delta Tirta memiliki sumber daya manusia yang cukup, walaupun belum diketahui secara pasti bagan atau struktur khusus untuk tim CSR. Untuk itu, dengan sumber daya manusia yang tersedia sudah seyogyanya PDAM Delta Tirta Sidoarjo dapat menerapkan strategi untuk keberhasilan setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan. Penerapan strategi

yang dimaksud dapat meliputi target untuk operasional tahunan, aturan dalam organisasi, memberikan motivasi kepada para anggotanya dan mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada (Sari dan Meirinawati, 2021). Sumber daya yang dimaksud tersebut yang mana dalam pengimplementasian suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya fisik maupun nonfisik (Prayoga dan Yuhertiana, 2021). Ketidaktersediaan sumberdaya atau kurang optimalnya potensi sumberdaya akan berdampak pada ketidak-efektifan implementasi kebijakan atau program tersebut.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan sumber daya fisik yakni segala macam sarana yang berbentuk fisik yang akan mendukung kinerja para pimpinan perusahaan. Sementara yang dimaksud dengan sumber daya non fisik ialah sumber daya yang bisa berupa keterampilan, pengalaman, pendidikan, gaya kepemimpinan dalam manajemen perusahaan. Sumber daya non fisik memiliki ikatan yang cukup erat dengan adanya sumber daya manusia. Sumber daya yang memiliki kualitas tinggi tentu akan sangat berpengaruh terhadap suatu hasil yang akan diperoleh. Sumber daya manusia yang mencukupi, berkompeten serta memiliki kecakapan yang mumpuni tentu dapat memengaruhi tugas-tugas, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diberikan kepadanya yang mana hal itu diperlukan oleh implementor. Sehingga pada pengembangan mekanisme *checks and balance*, seharusnya dapat dilakukan dengan baik.

3. Sustainability

Implementasi program CSR dapat dinilai berhasil apabila telah memenuhi empat kunci utama yaitu:

Pada poin pertama yakni pengaruh masyarakat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan keberlanjutan dari implementasi program CSR yang dilaksanakan. Menurut (Pranoto dan Yusuf, 2014) tanggapan serta partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian program CSR dapat digunakan sebagai salah satu hal yang utama dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu program, terutama dalam program yang berbasis pada pengembangan ekonomi secara mandiri dan mampu memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, program CSR bina lingkungan yang diselenggarakan oleh PDAM Delta Tirta tidak lepas dari merebaknya wabah Covid-19. Untuk itu program CSR melalui pemberian bantuan sosial

berupa sembako ini diberikan kepada masyarakat Sidoarjo yang terdampak. . Dalam hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap dijalankannya suatu program. Dan untuk menentukan diberlakukan atau tidaknya suatu program perlu diperhatikan apakah program CSR tersebut mampu memberi dampak baik atau dampak positif bagi masyarakat dan bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat.

Dampak yang diterima tersebut juga merujuk pada poin kedua yakni dampak terhadap lingkungan sekitar. Pemberian bantuan sosial dalam program CSR ini tampaknya memberi dampak yang cukup berarti, sebab bagi mereka yang di-PHK bantuan sosial ini dapat sedikit membantu meringankan beban mereka untuk menyambung hidup selama wabah Covid-19 masih merajalela. Dalam hal ini, CSR mewujudkan pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sistem pembangunan berkelanjutan (W et al., 2021). Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) maka perlu adanya peningkatan pemahaman dari masyarakat melalui kegiatan pendampingan masyarakat dengan difasilitasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Achmad, 2022).

Selanjutnya pada poin ketiga ada budaya organisasi yang juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Dalam sebuah organisasi tentu terdapat bagan atau struktur organisasi yang sejalan dengan pembagian tugas pokok serta fungsinya dalam suatu program yang sudah dikoordinasikan. Oleh sebab itu, struktur yang akan mengeksekusi suatu program tersebut sangatlah memiliki peranan penting dalam berjalannya suatu organisasi (Faradin dan Fanida, 2021).

Pada masing-masing organisasi tentu suatu perusahaan memiliki budaya tersendiri. Budaya organisasi yang ada tidak dapat dipisahkan dengan disposisi atau peran dari kecenderungan dan tingkah laku pelaksana program yang berkaitan dengan karakteristik implementornya, baik dari pimpinan hingga tim pelaksana di lapangannya. Disposisi juga dapat diamati dari bagaimana tanggung jawab atau komitmen aparat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut juga memiliki arti bahwa pelaksana program yang baik memiliki komitmen dalam menjalankan kewajibannya walaupun masih dibutuhkan perhatian khusus terhadap berjalannya kinerja dan fungsi organisasi sebagai tindak lanjut komitmen.

Sikap sang implementor juga sangat diperlukan untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat keberhasilan implementasi sebuah program karena sikap implementor dapat mempengaruhi para anggota yang berada dibawah kendalinya (Azizah dan Prabawati, 2021). Dalam hal ini, disposisi tentu memiliki peranan yang cukup penting pada implementasi program CSR bina lingkungan pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Budaya organisasi yang juga memuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komitmen dan persepektif. Komitmen organisasi terhadap manajemen perusahaan yang bertanggungjawab secara ekologis dan sosial juga merupakan dasar untuk mengintegrasikan konsep CSR ke dalam perusahaan (Achmad dan Yulianah, 2022).

Implementasi program CSR bina lingkungan yang dilakukan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo juga memuat komitmen dan perspektif yang dimiliki oleh kepala daerah yakni Bupati Sidoarjo dengan kepala direksi PDAM Delta Tirta. Komitmen dan perspektif Bupati Sidoarjo dengan kepala direksi dapat dikatakan cukup sama yakni menilai keduanya menilai bahwa kegiatan CSR merupakan salah satu program yang cukup penting untuk dilaksanakan. Sebab, dengan adanya kegiatan CSR maka membuktikan bahwa perusahaan yang berstatus sebagai BUMD ini telah memiliki dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan maupun masyarakat disekitarnya. Oleh karenanya, program CSR bina lingkungan ini dapat dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat Sidoarjo yang terdampak dan membutuhkan.

Kemudian pada poin keempat adalah keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keuangan merupakan faktor yang tak kalah penting didalam suatu implementasi program. Dalam hal keuangan, akan dapat diketahui bagaimana suatu perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendanaannya. Mulai dari darimana asal pendanaan didapatkan, bagaimana pengelolaannya hingga apakah program yang serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendanaan yang ada apabila pendanaannya dilakukan dengan tepat guna.

Mekanisme atau prosedur kerja pada pengelolaan pendanaan yang digunakan dalam pengimplementasian program CSR ini sudah semestinya dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Adanya mekanisme atau prosedur kerja didalam sebuah pengelolaan

kebijakan inilah yang disebut dengan struktur birokrasi (Juliar dan Dahtiah, 2020). Sebuah struktur birokrasi memiliki fungsi penting yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yaitu dengan menyusun *Standar Operating Procedures* (SOP) (Prayoga dan Yuhertiana, 2021). Dengan adanya SOP ini diharapkan mampu menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan menyelaraskan tanggung jawab program dengan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia.

Sementara itu pembagian tanggung jawab untuk suatu bidang kebijakan atau program tertentu diantara unit-unit organisasional ini disebut dengan fragmentasi. Dengan adanya struktur organisasi yang fleksibel, tidak rumit ataupun berbelit-belit akan dapat mempermudah fungsi prosedur pelaksanaan program (Azizah dan Prabawati, 2021). Pada pengimplementasian program CSR yang dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang terkait dengan keuangan belum diketahui secara pasti oleh peneliti. Sebab untuk urusan keuangan, pihak PDAM sangat tertutup. Sehingga darimana asal keuangan atau pendanaan dan bagaimana pengelolaannya, peneliti tidak mengetahuinya. Untuk itu keberlanjutan dari program CSR ini peneliti belum dapat memberikan penilaian mengenai berhasil atau tidaknya implementasi program CSR yang dijalankan, selain itu juga karena dari data yang diperoleh peneliti, program CSR bina lingkungan dalam bentuk bantuan sosial berupa sembako ini masih baru kali pertama dilaksanakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan, selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai salah satu perusahaan daerah yang berada dibawah naungan pemerintah, PDAM Delta Tirta Sidoarjo memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Implementasi CSR yang dilakukan PDAM Delta Tirta yakni dalam bentuk program bina lingkungan, khususnya pada program bantuan sosial kemasyarakatan. Program bantuan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan yakni melalui pemberian bantuan sosial berupa sembako yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19 di Sidoarjo yang berada di sekitar PDAM Delta Tirta tersebut.

Implementasi program CSR bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo telah sesuai

dengan yang dijabarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Implementasi program CSR Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo yaitu pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat Sidoarjo yang berada di wilayahsekitar perusahaan telah berhasil dilaksanakan dilapangan.

Ditinjau dari tiga prinsip yang peneliti fokuskan yaitu *accountability*, *transparency*, dan *sustainability*. Maka dapat disimpulkan bahwa:

Pada prinsip *accountability* (akuntabilitas) yakni dapat dikatakan baik dilapangan karena telah memenuhi tiga poin dari empat kunci utama keberhasilan. Sedangkan pada poin terakhir yakni perihal komparabilitas yang mana juga menyiratkan konsistensi saja yang masih belumterpenuhi, karena program CSR yang dilaksanakan baru berjalan satu kali. Sehingga peneliti tidak bisa membandingkan keberhasilan implementasi program yang sudah berjalan dengan program ditahun sebelumnya.

Pada prinsip *transparency* (transparansi) dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik dilapangan. Sebab dari empat poin kunci utama keberhasilan implementasi program, hanya satu poin yang terpenuhi yakni pada poin penyebaran informasi kepada masyarakat.

Pada aspek *sustainability* (keberlanjutan) dapat dikatakan belum cukup baik dilapangan. Hal tersebut karena dari empat poin kunci utama keberhasilan implementasi CSR hanya terdapat dua poin saja yang terpenuhi yakni pengaruhnya terhadap masyarakat dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan dua poin lainnya yakni budaya organisasi dan keuangan belum terpenuhi dan masih memerlukan perbaikan di masa mendatang.

Untuk itu tingkat keberhasilan implementasi program CSR (Crowther dan Aras, 2008) bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo dapat dikatakan kurang berhasil, terutama pada bagianatau aspek yang mengenai hal transparansi dan keberlanjutan programnya.

Saran

Berdasar hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yakni:

1. Ditinjau dari belum adanya laporan yang memuat kegiatan atau program CSR pada PDAM Delta Tirta, sebaiknya kegiatan atau program CSR yang telah dilaksanakan dapat diunggah di *website* resmi

PDAM Delta Tirta. Agar *website* tersebut lebih *up to date* dan masyarakat pun dapat mengetahui apa saja kegiatan maupun laporan tahunan perusahaan tersebut sehingga aspek *transparency* (keterbukaan) dalam implementasi CSR juga dapat terpenuhi.

2. Sementara itu, ditinjau dari aspek *sustainability* (keberlanjutan) masih perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan di masa mendatang terutama pada poin budaya organisasi dan keuangan. Selain itu, akan menjadi lebih baik apabila besaran persentase untuk dana CSR yang perlu dialokasikan oleh tiap perusahaan dicantumkan, baik dalam peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Sehingga masing-masing perusahaan akan lebih optimal dalam menyiapkan dana untuk mengimplementasikan program CSR.
3. Selanjutnya, dengan adanya patokan besaran persentase dana CSR yang wajib dialokasikan, peneliti berharap PDAM Delta Tirta juga dapat mempublikasikan mengenai pendanaan program CSR sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan. Sehingga dengan adanya transparansi tersebut, program yang dijalankan dan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan. Tak hanya itu, dengan adanya transparansi pendanaan maka kegiatan atau program CSR dapat diajukan sebagai agenda tahunan agar program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainability*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2022). Corporate Social Responsibility and Zakat: A Model of Philanthropy in the Society Era 5.0. *Jurnal Scientia*, 11.
- Achmad, W., & Yulianah. (2022). Corporate Social Responsibility of the Hospitality Industry in Realizing Sustainable Tourism Development. *Enrichment: Journal of Management*, 12, 1610–1616.
- Alifah, N. N. (2020). *Implementasi CSR: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pindaad Bandung*.
- Aulya, R., Suryono, A., & Prasetyo, W. Y. (2014). Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2, 608–612.
- Azizah, A. N., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Publika*, 9.
- Crowther, D., & Aras, G. (2008). *Corporate Social Responsibility*.
- Faradin, S., & Fanida, E. H. (2021). “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tirta Abadi Melalui Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Publika*, 9 Nomor 3, 81–96.
- Gaus, N. Z., & Meirinawati. (2021). Efektivitas Program Pusat Ekonomi Jambangan Hebat (PEJABAT) Melalui CSR (Corporate Social Responsibility) UMKM PT. Pertamina di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 9 Nomor 3, 125–138.
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pub. L. No. PER-09/MBU/07/2015 (2015).
- Kotaku. *Bappeda Kab. Sidoarjo Gandeng FK-BKM Sosialisasikan CSR*. Retrieved April 12, 2022, from <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=6247&catid=1>
- Limberg, G., Iwan, R., Moeliono, M., Indriatmoko, Y., Mulyana, A., & Utomo, N. A. (2009). Bukan Hanya Laba Prinsip Prinsip Bagi Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggungjawab Sosial. In *Center for International Forestry Research*.
- M., M. G., & Thaher, S. (2018). Analisa Keselarasan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan yang Beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Selodang Mayang, 4 Nomor 2*, 118–122.
- Mardiansyah, R., & Safaruddin. (2022). Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Semen Baturaja di RT 09 RW 04 Kelurahan Sekajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. *JUPITER Jurnal Pengetahuan & Ilmu Terapan, 3*.
- Pambayun, D. P. L., & Oktariyanda, T. A. (2021). Kualitas Layanan Go Online Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Rumah BUMN Bank Mandiri Surabaya. *Jurnal Publika, 9 Nomor3*, 97–108.
- Pandemik Corona, Amir Aslichin Minta PDAM DeltaTirta Sidoarjo Gratiskan MBR*. (n.d.). Retrieved March 1, 2022, from Pandemik Corona, Amir Aslichin Minta PDAM Delta Tirta Sidoarjo Gratiskan MBR
- Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2014). Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 18*.
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>
- Prorakyat. *CSR di Sidoarjo Belum Dikelola Optimal, Masyarakat Perlu Tahu Data Realisasinya*. Retrieved February 28, 2022, from <https://m.prorakyat.co/baca-918-csr-di-sidoarjo-belum-dikelola-optimal-masyarakat-perlu-tahu-data-realisasinya>
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Diatmika, I. P. G. (2018). Green Accounting: A Management Strategy and Corporate Social Responsibility Implementation. *International Journal of Community Service Learning, 2*, 149–156.
- Rahayu, A. S. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia, 6*.
- Sari, A. W., & Meirinawati. (2021). Manajemen Strategi Program Sentra Wisata Kuliner Urip Sumoharjo Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. *Jurnal Publika, 9 Nomor 1*, 105–118.
- Siham, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Pajak Online E-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat. *Publika*.

Suharto. (2006). *No Title*.

W, R. W. A., Kunyanti, S. A., & Mujiono. (2021).
Community Empowerment-based Corporate Social
Responsibility Program in Panglima Raja Village.
*International Journal on Social Science, Economics
and Art*, 11, 12–19.

Wijonarko, G., & Astuti, S. J. W. (2022). Implementation
of corporate social responsibility based on the triple
bottom line concept in the era of Covid 19 pandemic.
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8,
405–414.

Yuniarti, ., & Prakoso, C. T. (2018). Pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota
Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*.
<https://doi.org/10.52239/jar.v6i4.1936>